

INDEKS INTEGRITAS PERTAHANAN PEMERINTAH 2020

INDONESIA

Transparency International Defence & Security
Transparency International Indonesia

TRANSPARENCY INTERNATIONAL DEFENCE & SECURITY (TI-DS)



Tata Kelola Pertahanan



Korupsi dan
Kontrol Senjata



Integritas Sektor Bisnis



Konflik, Krisis dan
Keamanan

MENGAPA KORUPSI DI SEKTOR PERTAHANAN?

Sektor pertahanan sangat rentan terhadap korupsi karena:



Kontrak bernilai tinggi



Kerahasiaan



Koneksi Politik



Keahlian Khusus

MENGAPA KORUPSI DI SEKTOR PERTAHANAN?

Korupsi di bidang pertahanan dapat berdampak pada:

BERBAHAYA

→ *Korupsi pertahanan dapat membahayakan **keamanan dan stabilitas** dengan melumpuhkan kekuatan pertahanan.*

PERPECAHAN

→ *Korupsi pertahanan dapat memicu **kerusuhan dan perpecahan** dengan memperkuat musuh bersenjata dan merusak kepercayaan publik.*

KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

→ *Korupsi pertahanan dapat **menyia-nyiakan sejumlah besar sumber daya publik** dengan mengalihkan dana ke kantong pribadi.*

INDEKS INTEGRITAS PERTAHANAN PEMERINTAH 2020

- Indeks ini mengukur **tingkat risiko korupsi** di lembaga pertahanan nasional
- GDI 2020 menilai **86 negara** di seluruh dunia
- Menilai **keberadaan, efektivitas, dan penegakan kontrol** kelembagaan
- Fokus pada **5 area risiko** spesifik



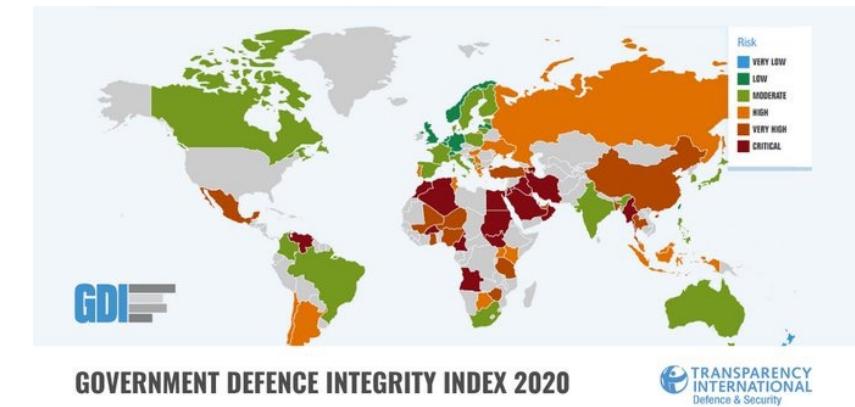
INDEKS INTEGRITAS PERTAHANAN PEMERINTAH 2020

- 1. Kementerian Pertahanan, Keamanan, dan Keuangan
- 2. Departemen audit internal dalam kementerian
- 3. Lembaga audit tertinggi atau pengadilan
- 4. Lembaga pengadaaan
- 5. Unit kepatuhan dan etika dalam Kementerian Pertahanan
- 6. Badan intelijen nasional
- 7. Badan kepegawaian dalam Kementerian Pertahanan
- 8. Polisi Militer
- 9. Bisnis milik militer
- 10. Lembaga antikorupsi
- 11. Komisi informasi
- 12. Ombudsman

INDEKS INTEGRITAS PERTAHANAN PEMERINTAH 2020

Pemilihan Negara yang dinilai:

- Negara-negara yang memiliki peran signifikan dalam perdagangan senjata global;
- Ukuran absolut terhadap per kapita militer suatu negara sebagai proksi ukuran sektor keamanan;
- Keragaman geografis;
- Negara-negara dengan instabilitas politik akhir-akhir ini;
- Negara yang memiliki indikasi reformasi yang diharapkan menghasilkan perubahan ;
- Negara dimana mitra Transparency International berada;



GDI 2020: KATEGORI RISIKO KORUPSI

Politik

Ex: strategi pertahanan negara; pengawasan legislatif; partisipasi sipil; audit internal dan eksternal; kontrol ekspor senjata

Anggaran

Ex: pelepasan aset; anggaran rahasia; bisnis milik militer; perusahaan keamanan swasta ilegal.

Personil

Ex: penggajian; rekrutmen & promosi; wajib militer; suap kecil dalam kepegawaian

Operasi

Ex: doktrin militer; pelatihan untuk personel; perencanaan operasi militer; perusahaan keamanan swasta.

Pengadaan

Ex: persyaratan pengadaan; penilaian & penghargaan tender; pengiriman kontrak; kontrak offset; agen & perantara;

POLITIK DAN
KEBIJAKAN

ANGGARAN

MANAJEMEN
PERSONEL

METODOLOGI

OPERASI MILITER

PENGADAAN

5 bagian, 77 pertanyaan, 212 indikator

RISIKO POLITIK DAN KEBIJAKAN

Pembuatan Kebijakan
Pertahanan

Kebijakan dan
Kelembagaan Antikorupsi

Kejahatan Terorganisir

Anggaran Pertahanan

Kontrol dari Badan
Intelijen

Pertahanan dan Aset
Nasional

Kontrol Ekspor Senjata

RISIKO ANGGARAN

Pengeluaran Rahasia

Kontrol Pelepasan
Aset

Bisnis Milik Militer

Belanja Pertahanan

Perusahaan Swasta Ilegal

RISIKO PERSONIL

Penggajian, Promosi,
Pengangkatan, Hadiah

Wajib Militer dan Rekrutmen

Kepemimpinan

Nilai dan Standar Militer

Whistleblowing dan Posisi
yang Berisiko Tinggi

RISIKO OPERASI MILITER

Pelatihan dan Pengawasan
Antikorupsi

Perencanaan Operasi
Militer di Masa Depan

Kontraktor Militer Swasta

Doktrin Militer

RISIKO PENGADAAN

Persyaratan Teknis dan Spesifikasi

Pemberian dan Pelaksanaan Kontrak

Kesepakatan Senjata

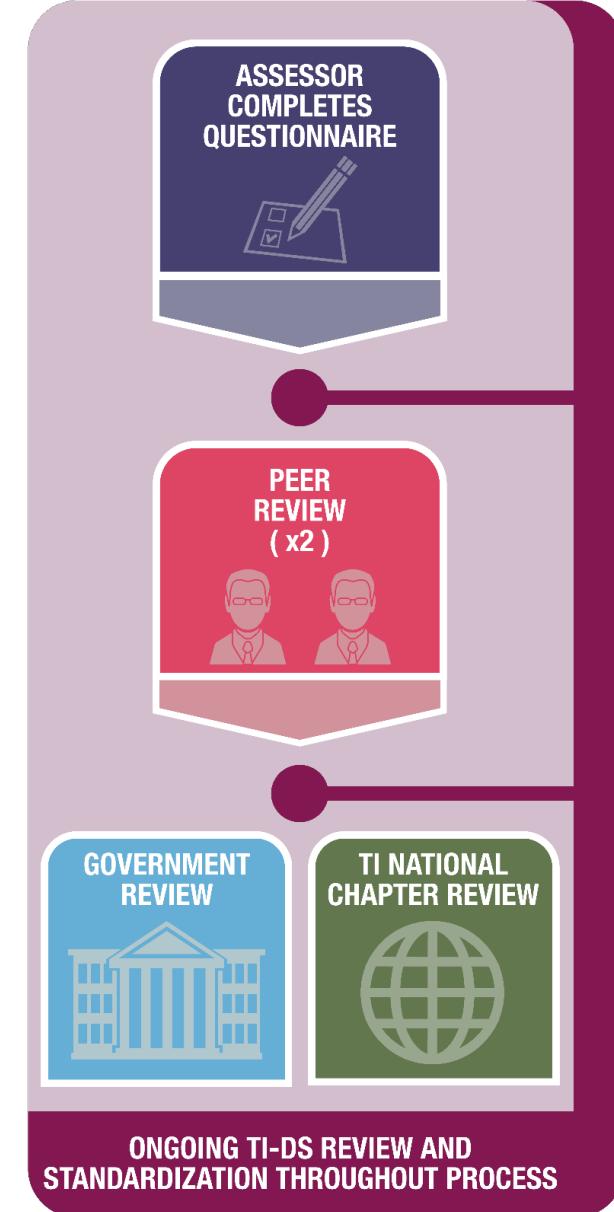
Kompetisi dalam Pengadaan

Kontrak *Offsets*

Agen dan Perantara

PROSES PENILAIAN

- Sumber data: regulasi yang relevan, dokumen kebijakan, pidato resmi, dan wawancara dengan birokrat dan pakar independen
- Tinjauan internal, tinjauan *peer*, tinjauan pemerintah, dan tinjauan chapter TI
- 77 pertanyaan, dibagi menjadi 212 indikator
- Penilaian di Indonesia pada periode June 2019 - December 2020

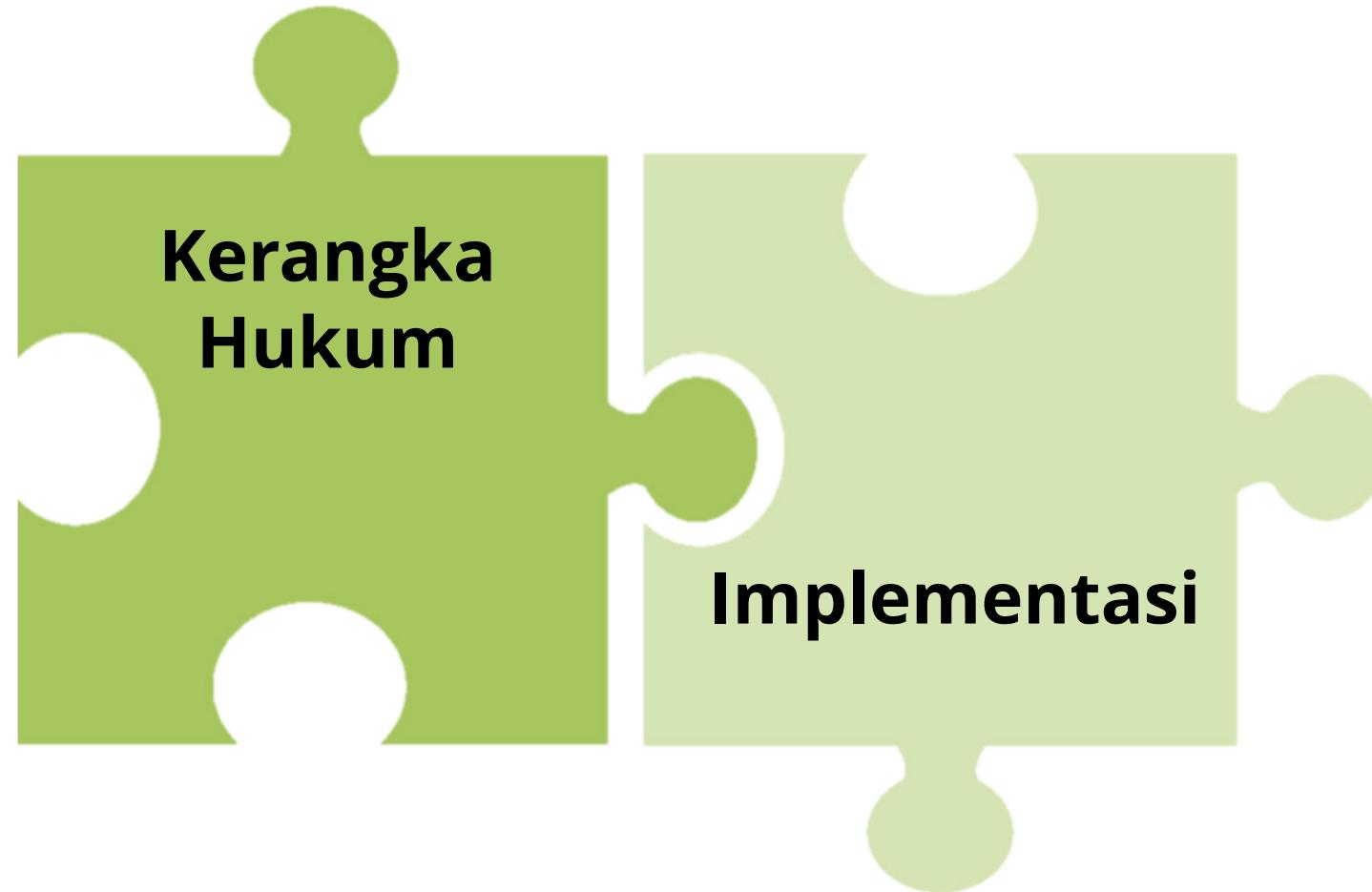


STRUKTUR INSTRUMEN GDI 2020

Contoh:

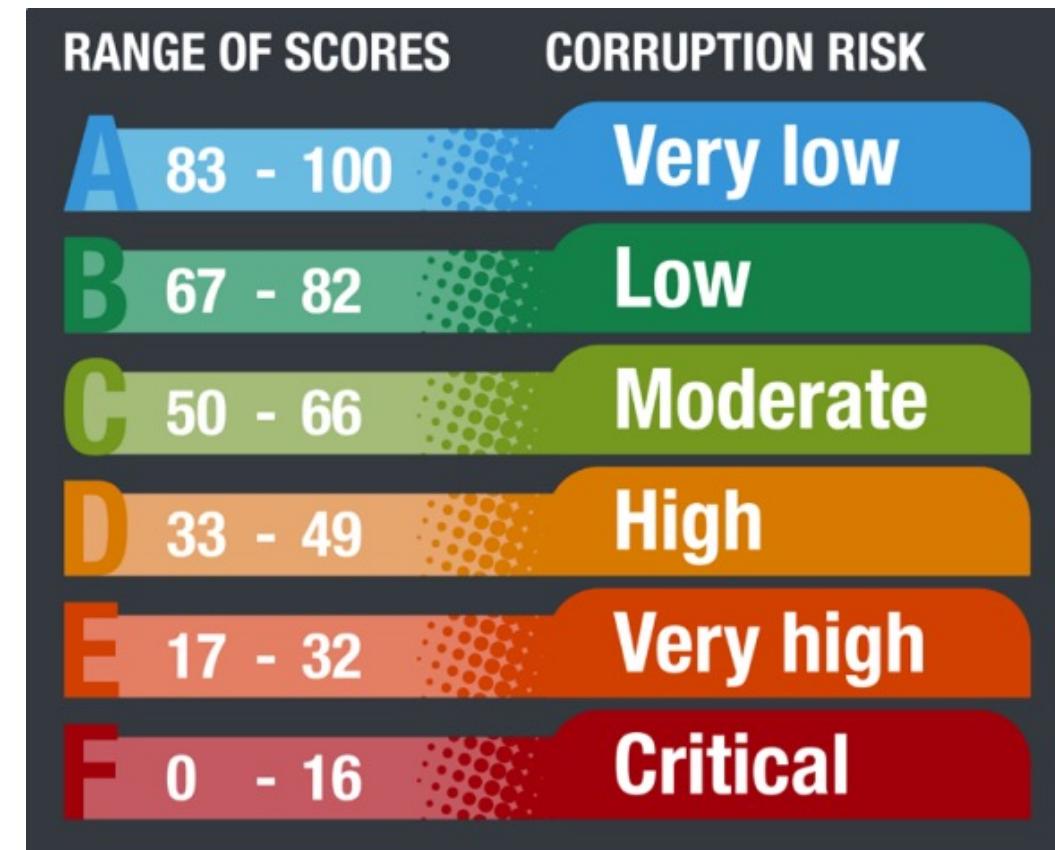


ASPEK PENILAIAN GDI 2020



SKORING PENILAIAN

- Setiap indikator dinilai dalam **lima tingkat** dari 0-100 (0/25/50/75/100).
- Skor indikator dikumpulkan (tanpa pembobotan) untuk menentukan pertanyaan, area risiko, dan skor keseluruhan.
- Skor diberikan band dari A-F, yang mencerminkan **tingkat risiko korupsi**
- GDI **tidak mengukur** tingkat korupsi yang sebenarnya.



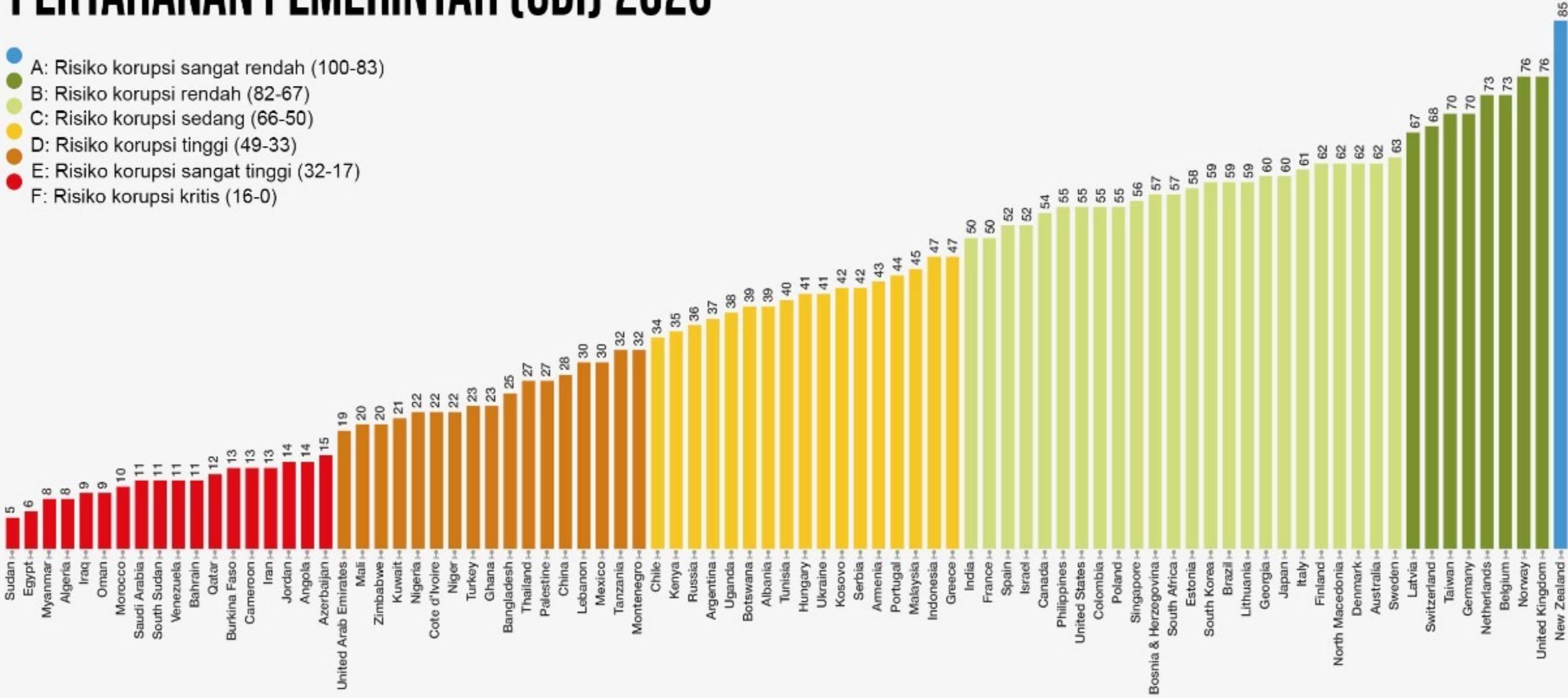
KOMPARABILITAS GDI 2015 & 2020

- 77 pertanyaan utama tidak berubah dari 2015 hingga 2020, namun **rubrik penilaianya berbeda**.
- Perbandingan dari waktu ke waktu hanya dimungkinkan pada **tingkat sub-indikator**



INDEKS INTEGRITAS PERTAHANAN PEMERINTAH (GDI) 2020

- A: Risiko korupsi sangat rendah (100-83)
- B: Risiko korupsi rendah (82-67)
- C: Risiko korupsi sedang (66-50)
- D: Risiko korupsi tinggi (49-33)
- E: Risiko korupsi sangat tinggi (32-17)
- F: Risiko korupsi kritis (16-0)



TEMUAN GLOBAL



**SELANDIA
BARU**

Skor 85/100

1

SUDAN

Skor 5/100

86

TEMUAN GLOBAL



62%

negara-negara yang diukur dalam GDI memiliki tingkat risiko korupsi yang **tinggi** hingga **kritis** di seluruh sektor pertahanan

TEMUAN GLOBAL

86%

Ekspor senjata global berasal dari negara-negara dengan risiko korupsi **sedang hingga sangat tinggi** di sektor pertahanan

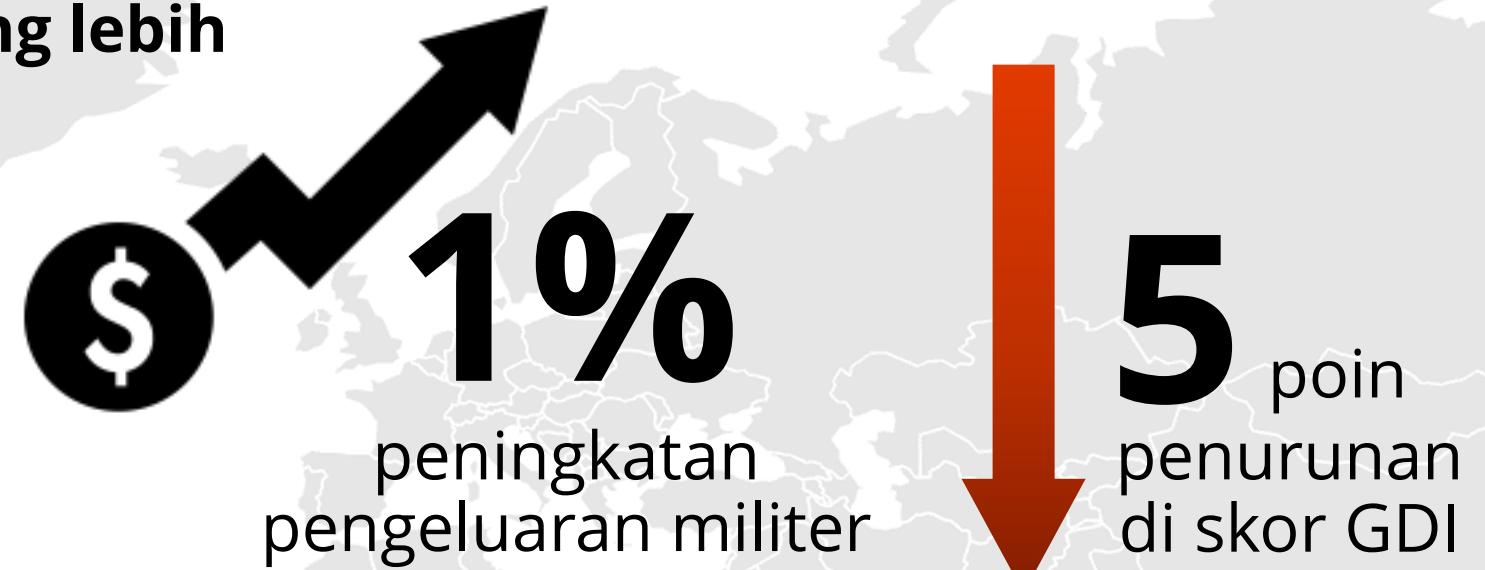
49%

impor senjata global tiba di negara-negara dengan risiko korupsi **tinggi** hingga **kritis** di sektor pertahanan



TEMUAN GLOBAL

Pengeluaran pertahanan yang meningkat dikaitkan dengan tata kelola pemerintahan yang lebih lemah



*Asosiasi statistik, menjaga semua skor lainnya konstan

TEMUAN GLOBAL



EU

Rerata skor negara EU
59/100

**sistem antikorupsi
sedang**

G20

Rerata skor negara G20
49/100

**sistem antikorupsi
lemah**

INDONESIA DI GDI 2020

**BERISIKO
TINGGI**

**47/
100**

SKOR

D

BAND

TINGKAT RISIKO

A	83-100	<u>SANGAT RENDAH</u>
B	67-82	<u>RENDAH</u>
C	50-66	<u>SEDANG</u>
D	33-49	<u>TINGGI</u>
E	17-32	<u>SANGAT TINGGI</u>
F	0-16	<u>KRITIS</u>

- GDI 2015: Band D
- GDI 2013: Band E



INDONESIA



INDONESIA DI GDI 2020

47/
100

SKOR

34/
86

PERINGKAT
GLOBAL

9/
14

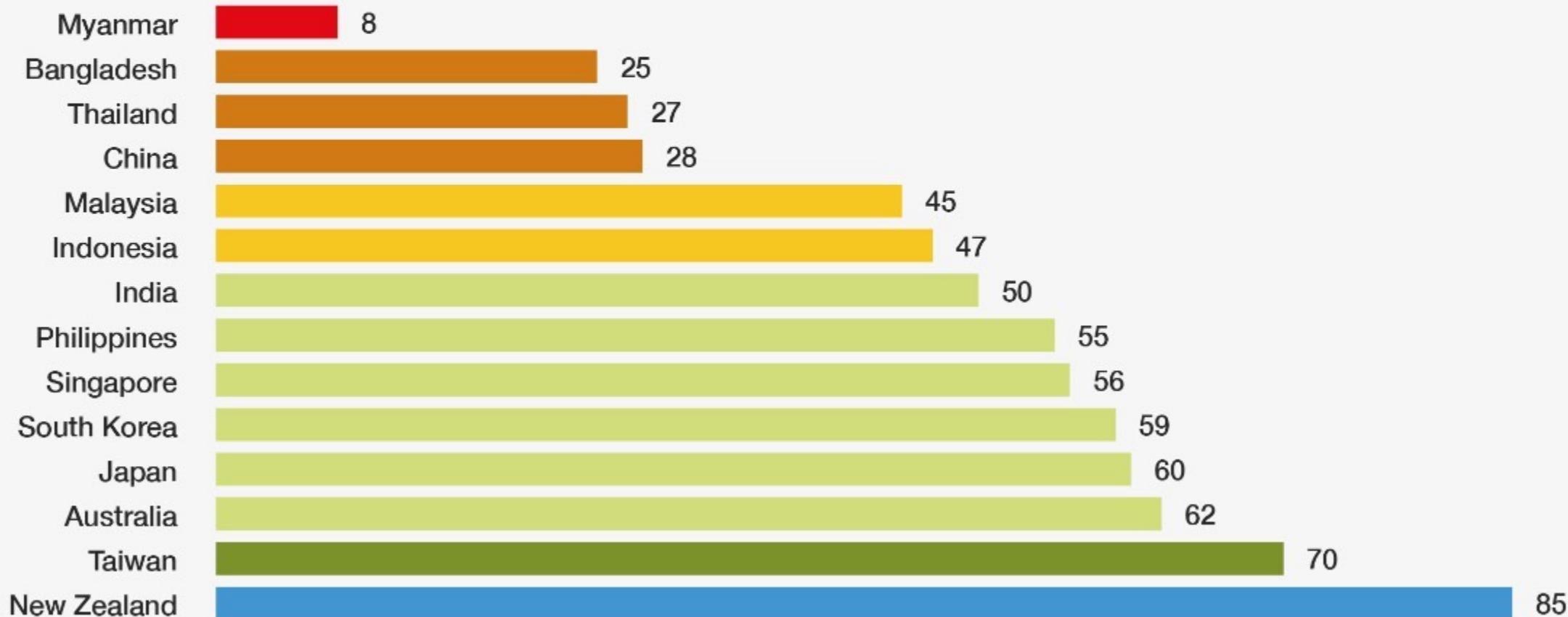
PERINGKAT
ASIA PASIFIK

INDEKS INTEGRITAS PERTAHANAN PEMERINTAH (GDI) 2020

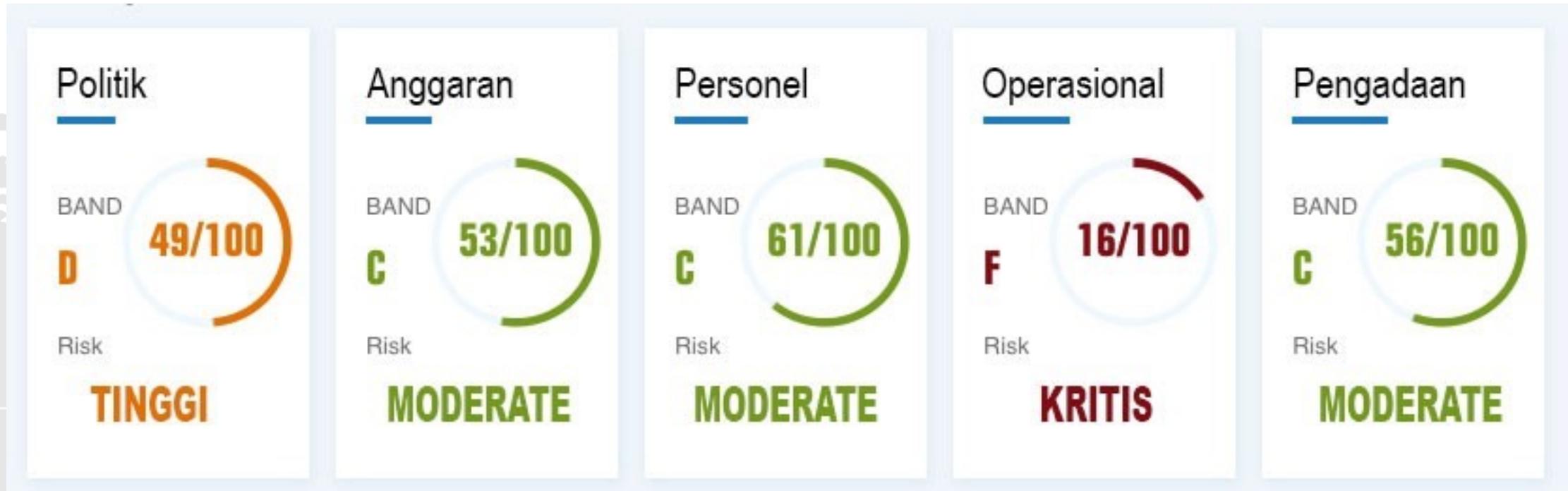
ASIA - PACIFIC

Indeks Integritas Pertahanan Pemerintah (GDI) mengukur resiliensi institusi pertahanan terhadap risiko korupsi. Skor yang didapatkan suatu negara merupakan komposit dari 5 indikator risiko korupsi: kebijakan politik, anggaran, manajemen personel, operasi militer dan pengadaan di sektor pertahanan.

- A: Risiko korupsi sangat rendah (100-83)
- B: Risiko korupsi rendah (82-67)
- C: Risiko korupsi sedang (66-50)
- D: Risiko korupsi tinggi (49-33)
- E: Risiko korupsi sangat tinggi (32-17)
- F: Risiko korupsi kritis (16-0)

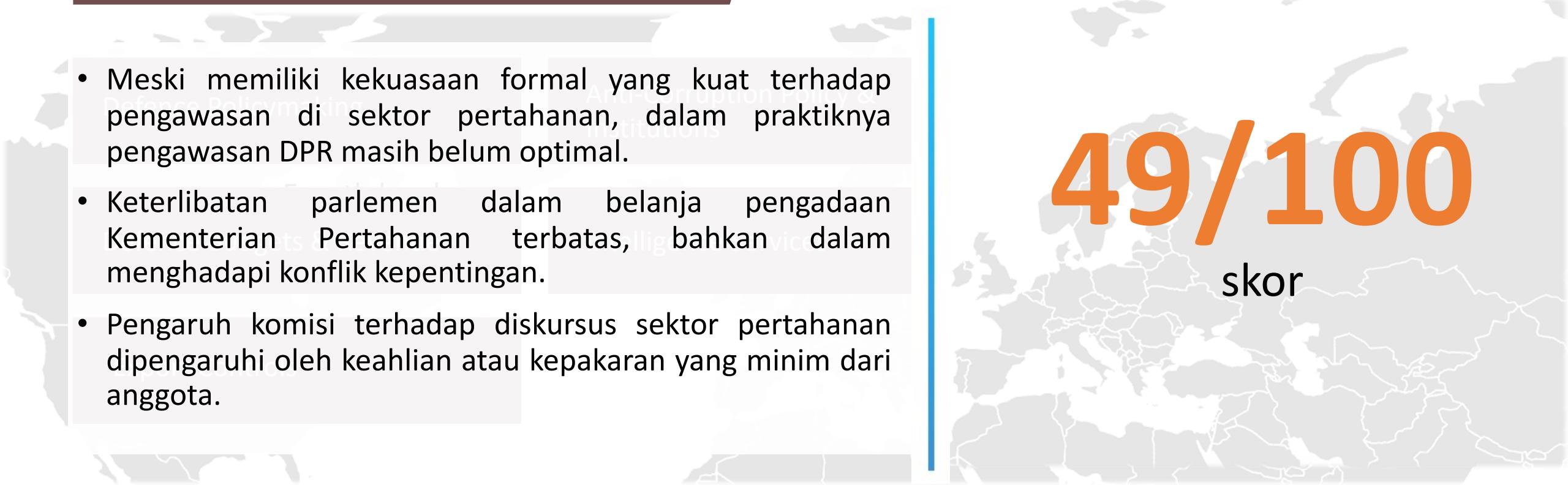


INDONESIA DI GDI 2020



RISIKO POLITIK DAN KEBIJAKAN

- Meski memiliki kekuasaan formal yang kuat terhadap pengawasan di sektor pertahanan, dalam praktiknya pengawasan DPR masih belum optimal.
- Keterlibatan parlemen dalam belanja pengadaan Kementerian Pertahanan terbatas, bahkan dalam menghadapi konflik kepentingan.
- Pengaruh komisi terhadap diskursus sektor pertahanan dipengaruhi oleh keahlian atau kepakaran yang minim dari anggota.



49/100
skor

ARUS KESEPAKATAN PERSENJATAAN INDONESIA

PETA EKSPOR

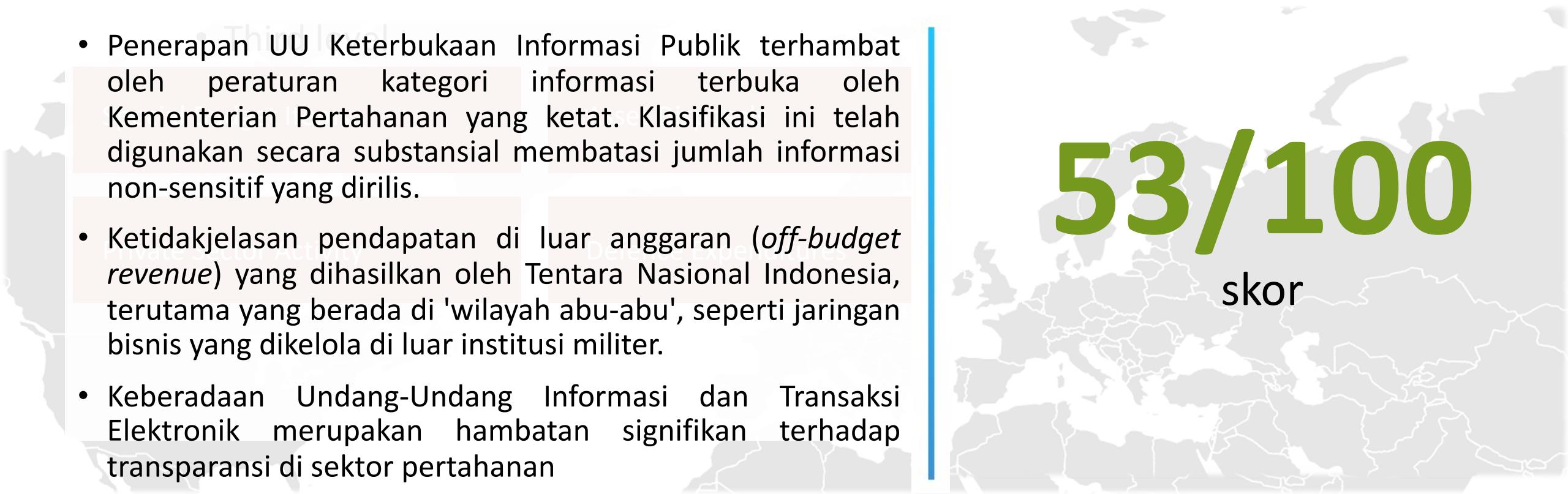


PETA IMPOR



RISIKO ANGGARAN

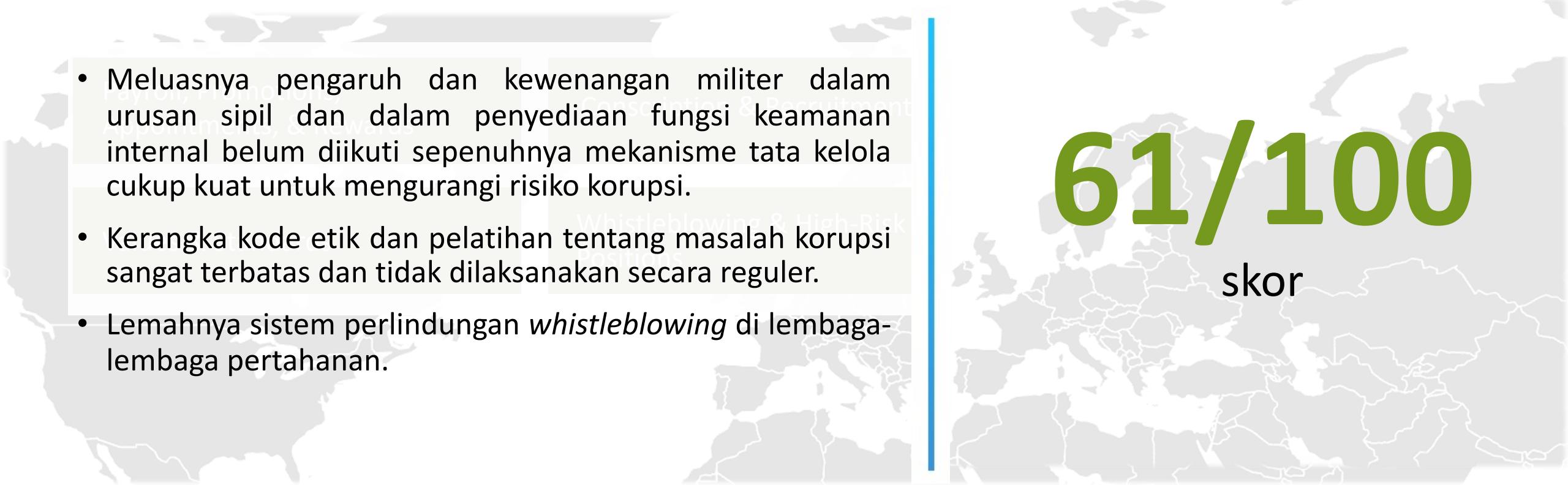
- Penerapan UU Keterbukaan Informasi Publik terhambat oleh peraturan kategori informasi terbuka oleh Kementerian Pertahanan yang ketat. Klasifikasi ini telah digunakan secara substansial membatasi jumlah informasi non-sensitif yang dirilis.
- Ketidakjelasan pendapatan di luar anggaran (*off-budget revenue*) yang dihasilkan oleh Tentara Nasional Indonesia, terutama yang berada di 'wilayah abu-abu', seperti jaringan bisnis yang dikelola di luar institusi militer.
- Keberadaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan hambatan signifikan terhadap transparansi di sektor pertahanan



53/100
skor

RISIKO PERSONEL

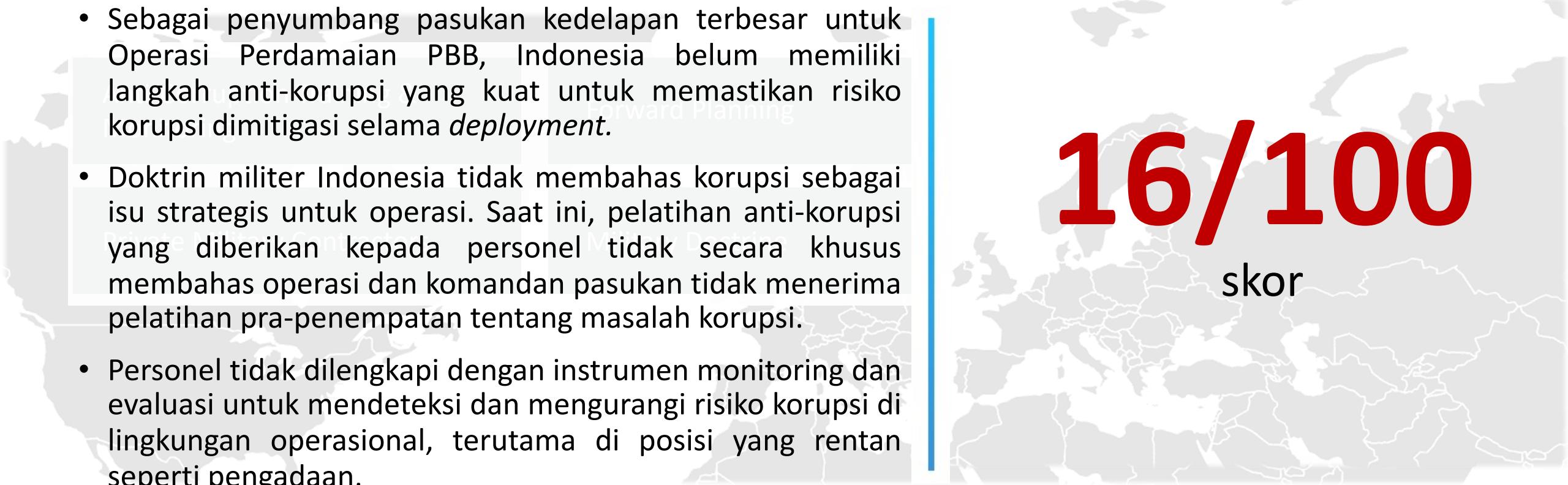
- Meluasnya pengaruh dan kewenangan militer dalam urusan sipil dan dalam penyediaan fungsi keamanan internal belum diikuti sepenuhnya mekanisme tata kelola cukup kuat untuk mengurangi risiko korupsi.
- Kerangka kode etik dan pelatihan tentang masalah korupsi sangat terbatas dan tidak dilaksanakan secara reguler.
- Lemahnya sistem perlindungan *whistleblowing* di lembaga-lembaga pertahanan.



61/100
skor

RISIKO OPERASI MILITER

- Sebagai penyumbang pasukan kedelapan terbesar untuk Operasi Perdamaian PBB, Indonesia belum memiliki langkah anti-korupsi yang kuat untuk memastikan risiko korupsi dimitigasi selama *deployment*.
- Doktrin militer Indonesia tidak membahas korupsi sebagai isu strategis untuk operasi. Saat ini, pelatihan anti-korupsi yang diberikan kepada personel tidak secara khusus membahas operasi dan komandan pasukan tidak menerima pelatihan pra-penempatan tentang masalah korupsi.
- Personel tidak dilengkapi dengan instrumen monitoring dan evaluasi untuk mendeteksi dan mengurangi risiko korupsi di lingkungan operasional, terutama di posisi yang rentan seperti pengadaan.

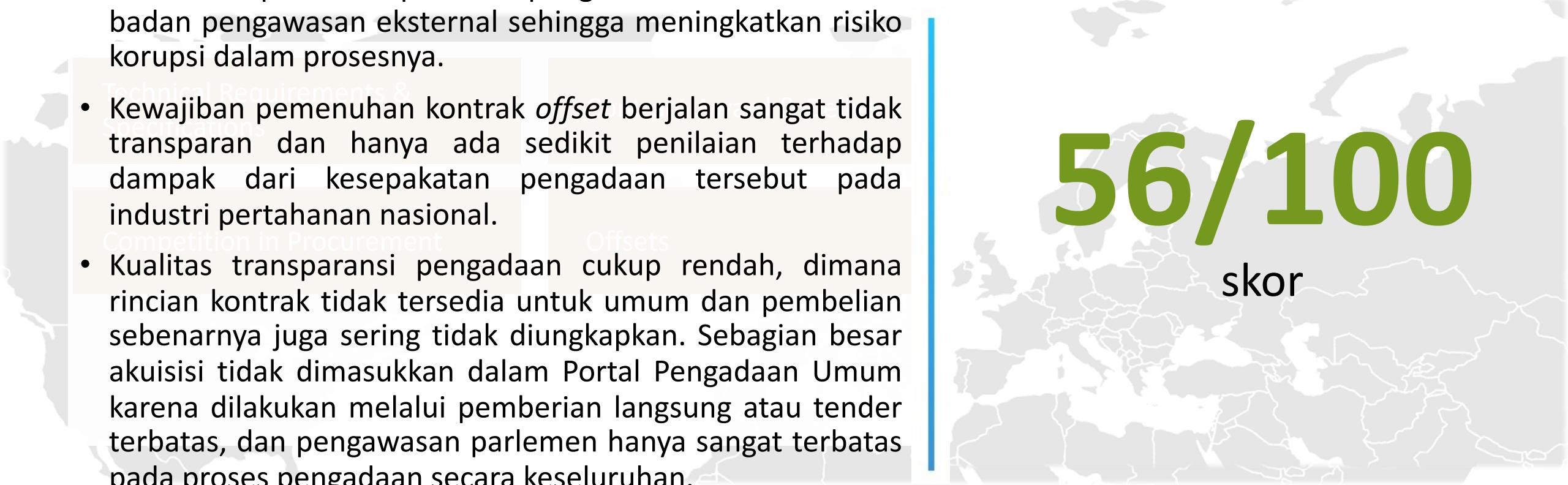


16/100

skor

RISIKO PENGADAAN

- Sebagian besar pengadaan pertahanan bersifat *single-source* dan pemilihan prosedur pengadaan tidak dinilai oleh badan pengawasan eksternal sehingga meningkatkan risiko korupsi dalam prosesnya.
- Kewajiban pemenuhan kontrak *offset* berjalan sangat tidak transparan dan hanya ada sedikit penilaian terhadap dampak dari kesepakatan pengadaan tersebut pada industri pertahanan nasional.
- Kualitas transparansi pengadaan cukup rendah, dimana rincian kontrak tidak tersedia untuk umum dan pembelian sebenarnya juga sering tidak diungkapkan. Sebagian besar akuisisi tidak dimasukkan dalam Portal Pengadaan Umum karena dilakukan melalui pemberian langsung atau tender terbatas, dan pengawasan parlemen hanya sangat terbatas pada proses pengadaan secara keseluruhan.



56/100

skor

PETA RISIKO KORUPSI SEKTOR PERTAHANAN DI INDONESIA - GDI 2020

Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Kritis
<i>Off-budget spending</i>	Audit eksternal	Keterbukaan pengadaan potensial	<i>Whistleblowing</i>	Doktrin militer	Pengawasan praktik korupsi saat operasi militer
Sistem penggajian	Pengawasan anggaran	Audit internal	Mekanisme pengawasan pengadaan	Akses parlemen ke informasi pertahanan	Keterbukaan informasi pengadaan langsung
Mekanisme pengaduan	Standar kepatuhan bisnis	Regulasi pengadaan	Lembaga antikorupsi (KPK)	Kontrak offset	
Transparansi dan rincian anggaran	Komisi Pertahanan	<i>Beneficial ownership</i>	Kontrol lembaga pengadaan	Pelibatan CSO	
Sanksi terhadap kontraktor	Ketersediaan anggaran	Akses informasi	Rencana akuisisi pengadaan	Pengawasan bisnis milik militer	
Suap untuk jabatan tertentu	Jumlah personel	Agen dan perantara	Pengawasan badan intelijen	Kontrol ekspor senjata	
Penuntutan korupsi	<i>Facilitation payments</i>	Kompetisi kontrak offset	Pertahanan dan aset nasional (SDA)	Pelatihan antikorupsi	

KESIMPULAN

- Indeks Integritas Pertahanan Pemerintah 2020 memberikan gambaran bahwa sektor pertahanan Indonesia masih dijalankan secara kurang akuntabel dan transparan, dan disertai dengan kebijakan dan prosedur yang belum memadai untuk mengurangi risiko korupsi yang tinggi.
- Jika pemerintah serius membangun keamanan dan stabilitas nasional dan internasional, menanamkan mekanisme antikorupsi di lembaga pertahanan merupakan sebuah keharusan.
- Memperkuat aspek integritas di lembaga-lembaga pertahanan penting untuk mencegah konflik di masa depan, intervensi operasi militer yang gagal, dan kerugian manusia yang akan menyertainya.

REKOMENDASI

37



Penguatan pengawasan internal dan eksternal



Penguatan instrumen antikorupsi di lembaga pertahanan



Penguatan integritas perusahaan pertahanan



Penguatan pengawasan kelompok masyarakat sipil

TERIMA KASIH

Selengkapnya:

www.ti-defence.org/gdi

www.ti.or.id/government-defence-integrity-index/